

Penyunting:

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

KONFLIK LAUT CHINA SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KAWASAN



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia
dan Azza Grafika
2013



Judul:

Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xxii+148 hlm.; 17x24 cm
ISBN: 978-979-9052-95-7
Cetakan Pertama, 2013

Penulis:

Rizki Roza
Poltak Partogi Nainggolan
Simela Victor Muhamad

Penyunting:

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Desain Sampul:

Aiq Banindya Afad

Kredit Gambar:

<http://navy.81.cn/img/attachement/jpg/site170/20121206/dca971a787d5122aecf212.jpg>
<http://2.bp.blogspot.com/-4NoPesyLJ9o/UU2wL-t1ZeI/AAAAAAAAG4M/Hzxtoy7ptq0/s1600/al2.jpg>
http://4.bp.blogspot.com/-98VCl9aP6i8/UqHgJsLbLTI/AAAAAAAABnk/hd672qpS_18/s1600/summer_times_by_pycs_wallpaper.jpg
<http://img.okeinfo.net/content/2013/05/16/413/808124/ukRkQJuEts.jpg>

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta
Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri
B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520
Telp. +62 21-49116822

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiankan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR PENYUNTING

Buku ini merupakan kombinasi dari laporan penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2012, baik penelitian yang bersifat kelompok maupun individual. Topiknya terkait satu dengan lainnya, mengenai perubahan lingkungan strategis dewasa ini di kawasan, yakni eskalasi ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan yang diperebutkan dalam tumpang tindih klaim negara-negara sekitarnya. Tulisan mengulas konflik Laut China Selatan dari berbagai perspektif, meliputi negara-negara yang berkonflik, klaim dan posisi mereka masing-masing, aktor negara dan non-negara yang terlibat dalam konflik (*conflicting parties*), penyebab eskalasi konflik selama ini, implikasi konflik atas Indonesia dan kawasan, respons dan kebijakan Indonesia dan negara-negara yang berkepentingan, seperti Indonesia, RRC, dan AS, serta solusi yang berupaya dan seharusnya ditawarkan ASEAN. Kegiatan riset di lapangan, *focused group discussions*, wawancara mendalam dengan berbagai pihak di Jakarta dan wilayah sekitar perairan yang dipersengketakan, melengkapi data-data yang dikumpulkan, selain yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penulisan buku ini diawali dengan Prolog yang merupakan pengantar dari berbagai tulisan dan kajian yang ada. Bagian ini mencakup pembahasan tentang fokus penulisan, batasan masalah, dan metodologi yang digunakan. Adapun bagian akhir buku ini memuat epilog, yang merupakan evaluasi dan kesimpulan yang dibuat atas berbagai presentasi data atau informasi, serta kajian dan analisis yang telah dibuat para penulisnya. Buku dilengkapi dengan indeks untuk membantu dan memudahkan pembacanya mencari terminologi atau bagian tertentu yang diperlukan untuk diketahui dan dibaca secara cepat. Sebagai pelengkap, dan untuk mengetahui kedalaman analisis para penulisnya, di bagian akhir buku, dimuat *curriculum vitae* singkat, yang merupakan latar belakang tentang para penulisnya

Di *bagian pertama*, dengan tulisan yang dibuatnya, Rizki Roza lebih dulu mengajak pembaca untuk memahami latar belakang konflik Laut China Selatan secara komprehensif. Ia mengajak kita lebih dulu untuk melihat tumpang-tindih klaim yang terjadi dan dilakukan oleh negara-negara pengklaim di kawasan. Kemudian, penulis tersebut mengungkap potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung dan kepentingan negara-negara pengklaim

di LCS, yang menjadi pemicu ketegangan dan konflik. Di bagian terpenting tulisannya, ia mempresentasikan data-data dan mendiskusikan implikasi ketegangan dan konflik di LCS dengan upaya modernisasi militer para negara pengklaim.

Sementara, *bagian kedua* buku, yang berjudul “Konflik Laut China Selatan: Implikasi terhadap Indonesia dan Kawasan,” ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan. Tulisan ini dimulai dengan mengungkap kepentingan nasional Indonesia, dan juga kepentingan spesifik wilayah (provinsi) Indonesia terdekat. Pembahasan diikuti dengan respons pemerintah nasional, yakni para pemangku kepentingan terkait, terutama aparat keamanannya di laut dan udara, yang dilengkapi dengan perspektif (aparat) pemerintah daerah.

Selanjutnya, di *bagian ketiga*, Poltak Partogi Nainggolan melanjutkan pembahasannya dengan mempresentasikan tulisan tersendiri yang membahas mengenai kepentingan negara adidaya Amerika Serikat (AS) di Asia Pasifik, khususnya terkait stabilitas keamanan di perairan Laut China Selatan. Kajian atas kepentingan AS dilihat dari perspektif kebutuhan negara besar itu atas Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dan kawasan untuk mendukung keamanan energi dan kepentingan nasionalnya secara menyeluruh, termasuk dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan. Pembahasan bagian ini diharapkan dapat menjelaskan argumentasi yang ada di balik perubahan strategi keamanan (*strategy pivot*) AS dewasa ini, dari kawasan lain, seperti Eropa dan Timur-Tengah, untuk fokus dan menetap di Asia Pasifik.

Bagian keempat buku ini mengungkap dan membahas peran yang telah diperlihatkan ASEAN, dan solusi yang ditawarkan perhimpunan negara di kawasan Asia Tenggara tersebut dalam mengurangi eskalasi konflik dan meredakan ketegangan yang terjadi belakangan akibat klaim yang tumpang tindih, yang semakin menajam. Penulisnya, Simela Victor Muhamad, mengawalinya dengan mengungkap nilai strategis Laut China Selatan dan menjelaskan mengapa kawasan perairan tersebut menjadi ajang sengketa. Kemudian, dalam diskusi dan analisisnya lebih mendalam, ia mengungkap solusi damai yang telah dijalankan ASEAN selama ini. Pada bagian akhir tulisannya, disampaikan oleh sang penulis, rekomendasi dan kesimpulannya.

Kehadiran buku yang secara khusus dan mendalam membahas masalah konflik di Laut China Selatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggota parlemen (DPRRI) atas pemahaman mengenai perkembangan lingkungan strategis terkait klaim tumpang tindih di perairan Laut China Selatan, yang telah muncul sejak beberapa dasawarsa lalu, dan kian mengemuka dewasa ini. Namun, lebih dari itu diharapkan, kalangan akademis dan publik dapat memanfaatkannya data-data/informasi dan berbagai argumen dan analisis yang disajikan secara maksimal bagi pengembangan ilmu melalui koreksi dan

telaahan lebih jauh. Disadari bahwa buku ini memiliki keterbatasan dalam data dan tingkat ketajaman analisisnya, tetapi biarlah untuk kembali menjadi tanggung jawab para penulisnya.

Jakarta, akhir September 2013
Penyunting,

Poltak Partogi Nainggolan

PROLOG

Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.¹ Karena bentangan wilayah yang luas ini, dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, dewasa ini, beberapa negara, seperti Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia, yang bukan negara pengklaim, menjadi terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut China Selatan muncul pada tahun 2012.²

Karena sejarah navigasi dan perniagaan yang panjang di sana, yang diikuti penguasaan silih berganti atas wilayah, negara-negara di kawasan, dan bahkan, luar kawasan, telah memberi nama yang berlainan untuk wilayah yang diperebutkan itu. Dalam kebanyakan bahasa yang digunakan para pelaut Eropa, laut tersebut disebut sebagai *South China Sea*, atau Laut China Selatan. Pelaut Portugis, orang Eropa pertama melayari wilayah perairan itu dan sekaligus memberikan nama, mengatakannya sebagai *Mar da China*, atau Laut China.³ Mereka kemudian mengubahnya menjadi Laut China Selatan. Demikian pula, Organisasi Hidrografik Internasional menyebutnya sebagai Laut China Selatan, atau *Nan Hai* (Laut Selatan) dalam Bahasa China.

Yang lebih penting lagi, Laut China Selatan adalah kawasan perairan yang strategis, yang kaya sumber daya alam (SDA). Konflik antarnegara yang terlibat saling klaim kepemilikan atas pulau-pulau (kepulauan) di sana (*claimant states*) baru muncul di dasawarsa 1970, dan berulang kembali di dasawarsa 80, 90 hingga 2010 ini. Namun, tidak dapat disangkal di masa lalu, penguasa-penguasa tradisional dari Tiongkok (China) dan Vietnam, dan negara-negara

¹ Martin Sieff, "Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel Ungkap Konflik yang Lebih Dalam," *Asia Pacific Defense Forum*, 13 September 2012, diakses pada 26 Februari 2013.

² Fransisco Rosarian dan Aseanty Pahlevi, "Diklaim China, Natuna Dikawal TNI," *Koran Tempo*, 30 Januari 2013: A7.

³ Sieff, *loc.cit.*

baik yang terlibat saling klaim sekarang maupun tidak itu, pernah terlibat memperebutkan kontrol atas wilayah perairan di sana.⁴

Potensi kekayaan Laut China Selatan yang semakin dapat dieksplorasi belakangan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar Sumber Daya Alam (SDA), terutama mineral, minyak bumi dan gas alam. Pemerintah RRC sendiri sangat optimistik dengan potensi SDA yang ada di sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakannya. Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika (*Energy Information Administration --EIA*), RRC memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut China Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar.⁵ Di samping itu, perairan kawasan Laut China Selatan merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan banyak orang dari berbagai negeri yang terletak di sekitarnya.

Sengketa kepemilikan atau kedaulatan teritorial di Laut China Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di dua gugusan Kepulauan Paracel dan Spratly. Dalam kedua gugusan kepulauan tersebut terdapat pulau yang tidak berpenghuni, atol, atau karang. Wilayah yang menjadi ajang perebutan klaim kedaulatan wilayah ini terbentang ratusan mil dari Selatan hingga Timur di Provinsi Hainan. Republik Rakyat China (RRC) menyatakan klaim mereka berasal dari 2000 tahun lalu, saat kawasan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari bangsa China. Menurut Pemerintah RRC, pada tahun 1947, Pemerintah RRC mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan RRC atas wilayah Laut China Selatan.

Keterangan Pemerintah RRC itu dibantah Pemerintah Vietnam, yang juga mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut, dengan mengatakan bahwa Pemerintah RRC tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Paracel dan Spratly sampai dasawarsa 1940. Pemerintah Vietnam kemudian menyatakan bahwa dua kepulauan itu masuk wilayah mereka, bukan wilayah RRC, sejak abad ke-17, dan mereka memiliki dokumen sebagai bukti.⁶ Filipina juga memiliki klaim kedaulatan yang sama, dengan mengangkat kedekatan geografis ke Kepulauan Spratly sebagai dasar klaim terhadap sebagian wilayah kepulauan tersebut.

⁴ *Ibid.*

⁵ "Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan," *BBC online*, 21 Juli 2011, diakses pada Pebruari 2013. 26 Pebruari 2013.

⁶ *Ibid.*

Juga, Malaysia dan Brunei memiliki klaim kedaulatan terhadap sebagian kawasan di Laut China Selatan. Menurut kedua negara bertetangga dekat itu, perairan Laut China Selatan masih dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, seperti yang ditetapkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Memang Brunei tidak mengklaim kepemilikan wilayah atas dua kepulauan itu, sementara Malaysia, menyatakan bahwa sejumlah kecil kawasan di Spratly adalah kepunyaan mereka.⁷

Show of force dan manuver agresif dan provokatif, dan bahkan, konflik terbuka di kawasan Laut China Selatan telah terjadi berulang sejak dasawarsa 1970, selain telah berlangsung di masa lalu dalam sejarahnya. Hal ini diperlihatkan dengan silih bergantinya kontrol atau penguasa di wilayah itu, yang berdampak pada perubahan nama kawasan perairan tersebut. Bentrokan yang parah tercatat dalam tahun 1974, yang telah menewaskan tentara Vietnam. Pada tahun 1988 Angkatan Laut RRC dan Vietnam kembali terlibat konfrontasi di Spratly, dengan Vietnam kehilangan 70 personil militernya.⁸ Angkatan Laut Filipina juga pernah terlibat dalam ketegangan kecil dengan angkatan laut RRC, Vietnam, dan Malaysia. Konflik antara Angkatan Laut Filipina dan RRC pernah terjadi di Dangkalan Karang Scarborough. Begitu pula, antara Angkatan Laut Filipina dan Vietnam, yang sempat memanas setelah kapal dari kedua negara terlibat dalam provokasi yang saling memicu ketegangan.

Belakangan, Pemerintah RRC mengeluarkan pernyataan keras kepada negara-negara pengklaim kedaulatan atas Laut China Selatan untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan mineral di kawasan perairan tersebut. Sebaliknya, Filipina menuduh Angkatan Laut RRC tengah membangun kekuatan militer di Spratly. Sementara, menurut sumber Vietnam yang tidak dapat dipastikan, Angkatan Laut RRC telah sengaja melakukan sabotase atas dua kegiatan eksplorasi Vietnam di Laut China Selatan, yang kemudian menimbulkan protes massal anti-RRC terbesar di Hanoi dan ibukota Ho Chi Minh.⁹ Pemerintah Vietnam pun tidak luput dari tuduhan telah melakukan provokasi oleh RRC, karena telah mengadakan latihan militer dengan menggunakan peluru tajam di lepas pantai negaranya.

Klaim mutlak atas seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, yang dilancarkan pemerintah China secara tiba-tiba pada tahun 2012, telah memunculkan kekhawatiran negara pengklaim dan non-pengklaim di sekitarnya, serta negara luar kawasan atas masa depan kontrol, stabilitas, dan keamanan wilayah perairan di sana. Kekhawatiran yang meningkat kemudian

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

telah memicu eskalasi ketegangan, akibat muncul manuver-manuver militer dan upaya saling unjuk kekuatan angkatan bersenjata dan upaya provokasi dan intimidasi di perairan dan arena diplomasi. Selanjutnya diperlihatkan perilaku agresif dan beberapa upaya provokasi yang dilakukan angkatan laut RRC di wilayah perairan Laut China Selatan, yang sudah mereka klaim secara mutlak, terhadap angkatan laut dan nelayan asal Filipina dan Vietnam, atau sebaliknya. Aksi saling cegah dan usir dari kawasan perairan yang dipersengketakan itu terus meningkat belakangan, dan cenderung mengarah pada terciptanya konflik berskala rendah (*low intensity conflict*). Tetapi, tetap terbuka kemungkinan munculnya konflik bersenjata terbuka secara luas dengan intensitas tinggi (*high intensity conflict*), jika resolusi konflik permanen gagal ditemukan, mengingat besarnya kepentingan baik negara yang mengklaim maupun tidak (*claimant* dan *non-claimant states*), serta negara luar kawasan.

A. Fokus Persoalan

Terdapat paling sedikit 3 hal yang membuat Laut China Selatan menjadi wilayah perairan yang rawan konflik besar dewasa ini dan masa datang. *Pertama*, Laut China Selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang kaya, terutama minyak dan sumber energi lainnya, dengan beberapa gugusan pulau, yang tersebar di sekitarnya, yang menjadi perebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan, seperti China (Republik Rakyat China –RRC), Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. *Kedua*, karena letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia, dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia dan sebaliknya, melalui wilayah perairan negara-negara di paling sedikit di 3 kawasan penting, yakni Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia-Pasifik, maka, selain negara pengklaim itu, negara-negara yang terletak di sekitar Laut China Selatan tersebut, seperti Indonesia dan Singapura, bahkan Amerika Serikat (AS), berkepentingan setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Aktivitas pelayaran yang meningkat yang menggunakan jalur lintas perairan internasional di Laut China Selatan dan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis di negara-negara di ketiga kawasan penting itu, membuat peran Laut China Selatan semakin penting, dan baik negara-negara pengklaim dan non-pengklaim di sekitarnya, serta negara-negara luar sekaligus sensitif atas perubahan konstelasi kekuatan militer di berbagai negara tersebut dan juga negara luar kawasan yang berkepentingan, yang secara khusus targetnya diarahkan ke sana. Sehingga, setiap manuver kekuatan angkatan bersenjata,

terutama angkatan laut, yang tampak provokatif atau ofensif dari setiap negara, terutama yang dikategorikan sebagai negara besar (*big power*) dan adidaya (*super power*), akan mengundang reaksi dari negara yang merasa terancam kepentingannya dewasa ini (rutin) dan jangka panjangnya.

Selanjutnya, *ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama China, dan sebaliknya pertumbuhan yang menurun terus di Eropa dan AS, membuat banyak negara berupaya memperoleh kontrol atas atau memperebutkan kawasan perairan yang strategis dan dinamis itu, yakni Laut China Selatan. Baik China maupun AS dalam hal ini berupaya mengamankan kepentingan keamanan energi (*energy security*)-nya, dengan berupaya menguasai kawasan perairan yang dulunya bisa diterima secara kompromi melalui jalur-jalur diplomatik, resmi/formal atau tidak resmi/informal, untuk dikontrol bersama lewat upaya pencegahan diri (*self-restraint*) menghindari provokasi dan ofensif kekuatan bersenjata di perairan laut itu, namun sekarang ini cenderung dilanggar dengan inisiatif unjuk kekuatan dan keperluan memperlihatkan reaksi yang berimbang, dan bahkan, ada negara yang mulai mencoba menggunakan ancaman serta intimidasi halus dan menggunakan kekuatan fisik (militer) di lapangan, secara sendiri-sendiri (sepihak) ataupun bersama dalam kelompok (bersekutu).

Latihan militer sepihak ataupun bersama (bilateral) dilakukan di wilayah perairan Laut China Selatan di tengah ketegangan yang muncul, sehingga semakin memanas ketegangan dan memicu eskalasi konflik di kawasan. Walaupun eskalasi ketegangan selama ini belum pernah menimbulkan konflik bersenjata secara terbuka antara kekuatan militer negara pengklaim dan non-pengklaim yang berkepentingan dari dalam dan luar kawasan, tetapi upaya saling unjuk kekuatan dan provokasi, tampak semakin berani, dan semakin rawan sewaktu-waktu mengarah pada perang terbuka. Memang belum dapat dijamin bahwa konflik yang pecah itu akan bersifat terbatas atau berskala kecil, melainkan dapat meluas menjadi berskala besar dan tidak terbatas, mengingat pihak-pihak yang berkepentingan dan berkonflik di kawasan perairan tersebut beragam dan melibatkan negara-negara besar dan adidaya, yang memiliki tujuh dari sepuluh angkatan bersenjata terkuat di dunia, dengan tiga angkatan laut terbesar, selain juga merupakan kekuatan nuklir dunia.¹⁰

Mengingat pentingnya posisi Laut China Selatan yang rawan konflik dan implikasinya yang besar di kemudian hari bila pecah konflik bersenjata terbuka di perairan tersebut, maka penelitian ini akan mengupas, membahas dan menganalisis beberapa penyebab dan implikasi konflik yang rawan dan

¹⁰ "Laksamana Samuel J. Locklear III: Kami Tak Pernah Meninggalkan Asia-Pasifik," *Koran Tempo*, 18 Februari 2013: A14.

besar, yang diperkirakan di atas, secara gamblang dan komprehensif. Secara khusus, Indonesia, sekalipun bukan negara pengklaim memiliki kepentingan, namun klaim mutlak yang dilancarkan China atas seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya, pada tahun 2012 tersebut, turut mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia di wilayah perairan Natuna, yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.¹¹ Dengan klaim mutlak tersebut, bukan saja kedaulatan wilayah Indonesia atas Kepulauan Natuna yang terancam, tetapi juga seluruh kepentingan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, yang dihormati eksistensinya berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, khususnya hak-hak pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut. Padahal, tanpa ini saja, hak-hak tradisional nelayan Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna sudah terancam.¹²

Beberapa pertanyaan yang muncul kemudian, yakni (1) apa penyebab konflik di Laut China Selatan? (2) siapa saja aktor negara dan non-negara yang berkepentingan atas Laut China Selatan? (3) apa implikasi konflik terhadap kepentingan Indonesia dan stabilitas kawasan? (4) Apa solusi konflik yang dapat diajukan, termasuk peran yang dapat dilakukan oleh Indonesia, dan juga ASEAN yang 4 negara anggotanya terlibat dalam klaim tumpang tindih atas pulau-pulau dan wilayah perairan di Laut China Selatan, untuk dapat mencegah dan mengatasi konflik agar tidak berkembang menjadi perang terbuka antara negara yang mengklaim dan berkepentingan atas perairan tersebut?

B. Perspektif Teoritik

Konflik dapat dilihat dari berbagai perspektif, dengan melihat latar belakang, aktor yang terlibat dan kepentingannya, serta intensitas dan keluasan wilayah konflik. Dari latar belakangnya, konflik Laut China Selatan dapat dilihat dari klaim historis kepenguasaan wilayah di masa lalu oleh penguasa-penguasa tradisional yang berujung pada klaim pemilikan oleh penguasa selanjutnya dari wilayah kerajaan atau negara yang sama. Sedangkan dari aktor yang terlibat dan kepentingan yang menyertainya, beberapa negara di kawasan, baik yang merupakan anggota ASEAN maupun bukan, serta negara di luar kawasan adalah pemangku kepentingannya. Sementara, dilihat dari intensitasnya, konflik Laut China Selatan selama ini dapat dikategorikan sebagai konflik berskala rendah. Namun, dalam perkembangan di masa

¹¹ "TNI Waspadai Klaim Teritorial Tiongkok di Natuna," *Suara Pembaruan*, 30 Januari 2013.

¹² "Diklaim China, Natuna Dikawal TNI," *Koran Tempo*, 30 Januari 2013: A7.

depan, jika tidak dapat dikelola dan dicari solusi yang efektif, konflik tersebut dapat semakin terbuka sifatnya dan berkembang luas menjadi suatu konflik bersenjata antar-negara di kawasan. Dilihat dari wilayah kejadian, konflik sering muncul dan berulang terjadi di beberapa titik di kawasan perairan dan kepulauan Laut China Selatan yang berlokasi di kawasan Asia Tenggara, yang adakalanya berlangsung pula di wilayah-wilayah yang dapat diidentifikasi juga sebagai kawasan Asia Timur. Sehingga, konflik tersebut telah dapat diidentifikasi sebagai konflik kawasan (*regional conflict*).

Dari perspektif liberal, yang menekankan pendekatan yang rasional dan universal dari pandangan manusia, ditekankan bahwa manusia atau entitas nasional dalam bentuk bangsa dan negara rasionalitas selalu saja mendasari langkah pengejaran kepentingan mereka. Karena itu, harmoni yang potensial dari berbagai macam kepentingan berusaha dicapai. Sebagai konsekuensinya, kerja sama menjadi titik sentral dari hubungan antar-manusia dan bangsa dalam sebuah jalinan hubungan internasional.¹³ Peran pemerintah dalam hal ini menjadi penting, namun sentralisasi perannya akan menjadi buruk. Sehingga, ruang kebebasan tetap penting dan merupakan suatu hal yang secara politik menempati urutan supremasi, agar individu atau entitas bangsa dan negara bisa menghasilkan keputusan atau kebijakan yang tepat dan terbaik.

Dalam hal ini, jika harmoni kepentingan antar-(umat) manusia dan entitas bangsa dan negara selalu ada, umat manusia tidak mempunyai tujuan dan kepentingan menciptakan perang. Demikian pula, jika sentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan selalu dicegah, maka pluralisme politik dan demokrasi, atau pendapat yang beragam, selalu dihormati. Sehingga, distribusi kekuatan dan kewenangan, serta pengaruh di antara para aktor berlangsung, dan pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan bukan fokus pada sebuah negara atau pemerintah semata.¹⁴ Juga, jika alasan ilmiah atau rasionalitas menjadi karakteristik dalam pendekatan ini, maka para pengambil keputusan atau pembuatan kebijakan akan memperhatikan hak-hak dasar satu sama lainnya. Dalam konteks ini, logis, para pemangku kepentingan atas tercipta dan terpeliharanya stabilitas dan keamanan (perdamaian) di kawasan menghendaki solusi multilateral atas klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, dan bukan solusi yang lebih sempit, yakni bilateral, ataupun sepihak (unilateral), yang keduanya dikehendaki oleh pemerintah RRC dewasa ini.

¹³ Jill Steans and Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspectives and Themes*, Harlow: Longman, Pearson, 2001: 48-49.

¹⁴ *Ibid.*

Sementara itu, dari perspektif yang berlainan, yakni realis, tampak bahwa pendekatan sepihak RRC dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan dapat dipahami. Di sini, sikap unilateral pemerintah RRC dapat dihubung-hubungkan dengan sifat manusia atau pengambil keputusan yang hanya mendahulukan kepentingannya sendiri. Negara atau pemerintah identik dengan perilaku manusia yang egois, yang perilakunya didorong oleh sikap mementingkan dirinya sendiri. Kedaulatan (negara), tidak terkecuali atas wilayah atau teritori, tentu saja menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh-negara-negara dan pemerintah mereka. Sejalan dengan itu, kekuatan dan kekuasaan merupakan karakteristik yang mewarnai hubungan di antara mereka.

Adapun negara diargumentasikan selalu dimotivasi oleh kepentingan nasional dalam menjalankan hubungan internasional. Begitu pula kebijakan luar negeri yang dibuat dilandasi oleh adanya kepentingan nasional ini. Kekuatan dan kekuasaan diperlihatkan dalam perilaku internasional negara-negara dan motivasi mereka. Tidak heran, hubungan internasional dan tata dunia yang tercipta selalu bersifat konfliktual, atau diwarnai konflik, selain disebabkan oleh sikap egois dan mendahulukan kepentingan sendiri yang dominan dari negara-negara yang melakukan hubungan internasional. Dengan kata lain, hubungan-hubungan antar-negara dikonstruksikan pada tujuan mengejar kepentingan nasional yang egois, sehingga tidak terhindarkan pada akhirnya terjadi konflik antar-negara, dan bahkan perang. Sikap negara-negara dan pemerintah mereka yang egois kemudian menciptakan kondisi anarki dan ketidakamanan.¹⁵

Keseimbangan kekuatan (*balance of power*), secara realistis, selalu dikejar dan diciptakan, sehingga tidak ada sebuah kekuatan pun yang dominan dalam hubungan internasional, terutama di sebuah kawasan tertentu. Dengan demikian, kondisi anarki tidak cenderung memberi manfaat dan kemenangan dini pada sebuah kekuatan militer negara, tetapi dapat menciptakan dan menjamin kontrol dari semua negara yang berkontes dan berkepentingan terhadap klaimnya di sebuah kawasan. Harus dipahami, *balance of power* sejak awal memang tidak ditujukan untuk menciptakan dan menjamin perdamaian, melainkan untuk menjamin keamanan negara tertentu yang berkepentingan. Jumlah penduduk yang besar menjadi elemen dari kekuatan nasional, terlepas dari konsekuensi beban pemerintah yang besar dalam memberikan makanan dan pendidikan dan kesejahteraan untuk mereka. Secara realistis, jumlah penduduk yang besar, seperti di RRC dan AS, memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan kekuatan angkatan

¹⁵ *Ibid*: 28.

perang (militer) masing-masing negara. Kapasitas penduduk yang besar, di luar kemajuan teknologi yang telah dicapai, memberikan daya tawar yang besar pula dalam menciptakan keseimbangan kekuatan dalam hubungan internasional, terutama di kawasan. Faktor ini dapat memberikan jaminan bagi kelangsungan (*survival*) sebuah bangsa atau negara dalam kontestasi kekuatan di lapangan (kawasan).

Di lain sisi, perkembangan Laut China Selatan dapat dilihat dari tiga perspektif besar dalam disiplin hubungan internasional, yakni Machiavellian, Grotian, dan Kantian. Dari perspektif yang Machiavellian terdapat aliran yang agresif dan defensif, sedangkan perspektif yang Grotian memiliki aliran yang realistis dan idealis, serta perspektif yang Kantian memiliki aliran yang evolutioner dan revolutioner, atau (di antara dua perspektif kedua terakhir) bisa saling ditukar jenis alirannya. Namun, apapun posisi atau penilaian yang akan dipakai, yang hendak dikatakan di sini, negara yang menggunakan perspektif yang Machiavellian dalam kebijakan luar negerinya cenderung mengandalkan inisiatif-inisiatif agresif atau defensif, dengan mengupayakan berbagai macam cara, bahkan yang ditentang hukum internasional yang sudah disepakati bersama. Sementara, yang negara yang berlandaskan pengambilan keputusan yang Grotian dan Kantian, bisa terbawa aksi unjuk kekuatan militer (*show of force*) untuk penangkal (*deterrent*) terhadap lawan atau kompetitornya. Mereka bisa juga tetap mempertahankan garis pemikiran dan kebijakan luar negeri dan keamanan regional yang idealis, yang tetap menghormati hukum internasional yang berlaku. Namun, mereka juga bisa mengambil sikap dan menerapkan kebijakan yang tidak mengejutkan, namun perlahan, ataupun bisa memilih yang cepat dan revolusioner dampaknya.¹⁶

Dalam pemahaman yang lebih spesifik, yakni melihat kepentingan nasional (*national interest*) pendekatan yang Machiavellian menjustifikasi secara terbuka adanya konflik kepentingan. Negara yang menganut pandangan ini, berpendapat keamananmu negaramu adalah ketidakamanan bagi negara saya. Mereka memiliki dugaan yang bertentangan dengan kekuatan-kekuatan atau negara-negara kecil, suatu hal yang berbeda dengan negara yang menggunakan pendekatan yang Grotian, yang mau mendukung atau menolong negara-negara kecil. Karenanya, negara penganut kebijakan yang Grotian berupaya mengharmonisasi kepentingan nasional mereka. Bagi mereka, kepentingan nasional harus digerakkan oleh keadilan internasional, karenanya, keamanan kolektif (*collective security*) menjadi pilihan. Selanjutnya, negara yang Grotian mengedepankan norma non-intervensi dan harmoni kepentingan, seperti halnya yang Kantian, walaupun kebijakan luar negeri yang kontiniu membedakan negara yang Grotian dari yang Kantian.

¹⁶ Martin Wight, *International Theory: The Three Traditions*. Oxford, 1991: 160.

Diplomasi dalam perspektif negara yang menerapkan prinsip yang Machiavellian merupakan alat penangkal, tanpa ketergantungan politik, dengan kebijakan memecah dan memerintah (*divide and rule*), yang tidak dapat dihakimi oleh orang luar. Sementara, negara yang Groatian melihat diplomasi sebagai upaya retributif, dengan kesalingtergantungan politik, dengan kebijakan mempersatukan dan saling mempengaruhi, yang boleh dinilai atau dihakimi orang luar. Sementara, tindakan negosiasi, oleh negara yang menjalankan kebijakan luar negeri Machiavellian dilakukan dalam kondisi obyektif untuk memperoleh pengaruh politik dalam suasana yang dipenuhi ketakutan dan ketamakan pembuat kebijakannya. Di sini negosiasi dijalankan dengan kekuatan. Sedangkan negara yang Groatian menjalankan diplomasi dengan persyaratan yang sebanding dan rasa saling percaya, untuk merekonsiliasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Di lain pihak, negara yang menerapkan kebijakan luar negeri yang Kantian menjelaskan negosiasi dalam kondisi obyektif untuk mengurangi ketegangan dalam situasi diplomasi yang terbuka. Mereka juga mempertimbangkan opini publik dunia.¹⁷

Melalui perspektif yang lain, konflik Laut China Selatan dapat didekati melalui tiga pendekatan besar lain, yakni realisme, pluralisme, dan globalisme. Jika sebelumnya melalui pendekatan realisme telah dijelaskan bahwa kontestasi kekuatan dan upaya mencari perimbangan kekuatan selalu dilakukan, maka dalam pendekatan pluralisme, tidak ada aktor tunggal negara, walaupun ia merupakan aktor rasional. Negara terbagi dalam komponen-komponen yang mungkin beroperasi secara transnasional.¹⁸ Sedangkan kebijakan luar negeri dan proses transnasionalnya melibatkan konflik, proses tawar-menawar, koalisi, dan kompromi, yang tidak harus berujung pada keluaran yang optimal.

Agenda pembicaraan dalam pendekatan pluralisme mencakup isu sosial-ekonomi dan kesejahteraan, yang bisa lebih penting daripada isu keamanan nasional. Pendekatan pluralisme yang secara logis menekankan solusi multilateralisme, tampak serupa dengan globalisme, namun perbedaannya, ia tidak fokus pada pola-pola dominasi ekonomi inter- dan antar-negara. Kemudian, dalam pendekatan globalisme, aspek sejarah menjadi penting, khususnya dampak kontinuitas pembangunan kapitalisme dunia, bersama-sama dengan peran kelas dan masyarakat, di samping entitas negara, sebagai aktor non-negara, yang beroperasi sebagai bagian dari sistem kapitalis dunia.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*: 273-278.

¹⁸ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Boston: Allyn and Bacon, 1993: 7-10.

¹⁹ *Ibid.*

Diakui, selama ini, klaim teritorial yang berseberangan atau tumpang tindih juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif penilaian dan pengukuran batas wilayah yang berlainan dari setiap sudut negara pengklaim, apakah itu garis pangkal, landas kontinen, ZEE, atau metode delimitasi batas maritim lainnya.²⁰ Konflik, apalagi mengemuka, setelah pemerintah RRC melakukan klaim absolut yang mengacaukan tertib atau *security order* yang ada selama ini yang menjamin stabilitas interaksi dan sistem. Sementara, masa depan (prospek) hukum internasional yang berlaku di kawasan menjadi semakin dipertanyakan oleh para pemangku kepentingan, tidak hanya negara pengklaim.

C. Perspektif Metodologis

Penelitian mengenai konflik Laut China Selatan ini merupakan sebuah penelitian deskriptis-analitis, yang berupaya menjelaskan masalah-masalah penyebab konflik dan implikasinya, dengan menganalisisnya dari berbagai sudut pandang. Penjelasan deskriptis akan mengelaborasi berbagai permasalahan dari perspektif politik, keamanan, ekonomi, geopolitik dan geostrategik negara-negara yang memiliki klaim teritorial dan berkepentingan terhadap eksistensi dan prospek kawasan tersebut. Sementara, penjelasan analitis akan menambah penjelasan secara kritis atas konflik yang telah terjadi selama ini.

Data dikumpulkan pertama-tama melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber-sumber informasi yang melaporkan terjadinya peristiwa dan perkembangan konflik di Laut China Selatan secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini, sumber informasi media cetak dan elektronik sangat diandalkan. Selanjutnya, dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber di pusat dan daerah, seperti akademisi dan aparat keamanan negara yang berkepentingan, seperti Armada Barat/Armabar TNI AL, Gugus Keamanan Laut/Guskamla Batam, Lantamal IV Tanjung Pinang, dan Lanal Pontianak. Dari nara sumber di daerah atau satuan aparat keamanan yang lebih kecil ditanya atau diperoleh informasi mengenai informasi perkembangan keamanan di perbatasan perairan Indonesia dengan Laut China Selatan. Kemudian, *Focus Group Discussion* (FGD) diadakan untuk mengevaluasi informasi dan mempertajam perspektif dan alat analisis yang dipakai.

Data studi kepustakaan dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan penjelasan yang memadai atas pertanyaan-pertanyaan penelitian

²⁰ Lihat, I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar-Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

yang diajukan. Sedangkan data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dipilah secara cermat dan dipilih yang relevan untuk membantu memberikan penjelasan dan menyediakan analisis yang kritis. Selanjutnya, data yang diperoleh secara berbeda dimanfaatkan secara bersinergi, atau dikombinasikan untuk dianalisis secara mendalam, akurat, dan juga kritis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk dapat memenuhi tujuan dan kegunaan penelitian, analisis data dilakukan menggunakan berbagai perspektif, sehingga kemudian dapat menyajikan beberapa alternatif kebijakan.

Lokasi yang dikunjungi langsung untuk *field researches* adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Perairan di kedua provinsi ini, yang berbatasan dengan perairan internasional, berdekatan dengan Laut China Selatan, sehingga kedua provinsi tersebut layak untuk dikunjungi. Kunjungan lapangan antara lain untuk menggali informasi lebih dalam dari aparat keamanan Indonesia, khususnya TNI AL, yang cakupan operasinya meliputi wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik. Waktu penelitian lapangan dilakukan pada 19-15 Mei 201 dan penelitian lapangan kedua pada 1-7 Juli 2013.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penyunting.....	iii
Prolog.....	vii
A. Fokus Persoalan.....	x
B. Perspektif Teoritik.....	xii
C. Perspektif Metodologis.....	xvii
Daftar Isi.....	xix

Bagian Pertama

KONFLIK LAUT CHINA SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MODERNISASI MILITER

<i>oleh: Rizki Roza</i>	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Permasalahan.....	4
C. Kerangka Pemikiran.....	5
BAB II MEMAHAMI KONFLIK.....	7
A. Tumpang Tindih Klaim.....	8
1. Klaim China.....	9
2. Klaim Vietnam.....	12
3. Klaim Filipina.....	13
4. Klaim Malaysia.....	14
5. Klaim Brunei Darusaalam.....	15
B. Potensi Migas.....	16
1. Perkiraan Potensi Migas LCS.....	16
2. Peningkatan Kebutuhan Energi.....	17
C. Potensi Perikanan.....	19
D. Jalur Pelayaran Strategis dan Kebebasan Navigasi.....	20
BAB III IMPLIKASI KONFLIK TERHADAP MODERNISASI MILITER.....	23
A. Modernisasi Militer China.....	23
B. Modernisasi Militer Vietnam.....	27
C. Modernisasi Militer Filipina.....	29

D. Modernisasi Militer Malaysia.....	31
E. Modernisasi Militer Brunei Darussalam.....	33
BAB IV PENUTUP.....	35
BIBLIOGRAFI.....	37

Bagian Kedua

**KEPENTINGAN STRATEGIS AMERIKA SERIKAT
DI ASIA-PASIFIK, KHUSUSNYA INDONESIA**

<i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan.....</i>	41
BAB I PENDAHULUAN.....	43
BAB II KEAMANAN DAN ANCAMAN.....	49
BAB III KEPENTINGAN EKONOMI DAN SDA.....	53
BAB IV UPAYA MENGIMBANGI DOMINASI RRC.....	57
BAB V KESIMPULAN.....	65
BIBLIOGRAFI.....	67

Bagian Ketiga

**KONFLIK LAUT CHINA SELATAN:
IMPLIKASI TERHADAP INDONESIA DAN KAWASAN**

<i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan.....</i>	73
BAB I KEPENTINGAN INDONESIA.....	75
BAB II PERSPEKTIF PROVINSI KEPRI DAN KEPULAUAN NATUNA.....	79
BAB III PERSPEKTIF PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....	83
BAB IV PERSPEKTIF APARAT KEAMANAN LAUT.....	87
BAB V PERSPEKTIF APARAT KEAMANAN UDARA.....	95
BAB VI PENUTUP.....	99
BIBLIOGRAFI.....	101

Bagian Keempat

SENGKETA LAUT CHINA SELATAN DAN SOLUSI DAMAI ASEAN

<i>oleh: Simela Victor Muhamad.....</i>	105
BAB I PENDAHULUAN.....	107
A. Latar Belakang.....	107
B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian.....	109
C. Tujuan dan Kegunaan.....	109
D. Kerangka Pemikiran.....	109
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	113
A. Jenis Penelitian.....	113
B. Teknik Pengumpulan Data.....	113

C. Teknik Analisis Data	113
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	114
BAB III NILAI STRATEGIS DAN	
POTENSI LAUT CHINA SELATAN	115
BAB IV SENGKETA LAUT CHINA SELATAN	119
BAB V SOLUSI DAMAI ASEAN.....	123
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Rekomendasi.....	135
BIBLIOGRAFI.....	137
Epilog	141
Lampiran (Pedoman Wawancara).....	143
Keterangan Penulis	145
Indeks.....	147